

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI
SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN
JAKARTA UTARA**

(Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh :

Raka Hafizh Herdianto

NIT : 22314494

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN

POLITEKNIK AGRARIA STPN

YOGYAKARTA

2026

ABSTRACT

Digital transformation in the land administration sector through the implementation of electronic land certificates is part of the Indonesian government's effort to improve public service quality. The implementation of this service is influenced not only by technological and institutional readiness but also by community participation as service users. This study aims to analyze the level of community participation and its association with the implementation of electronic land certificates based on users' perceptions at the North Jakarta Land Office, focusing on residents of Tanjung Priok District.

This study employed a quantitative method with an explanatory survey approach. Data were collected in 2026 through questionnaires distributed to 100 respondents selected using purposive sampling, consisting of residents of Tanjung Priok District who had used electronic land certificate services. Community participation was measured through indicators of information access, service process, procedural compliance, and evaluation and feedback. The implementation of electronic land certificates was assessed based on users' perceptions of service effectiveness, efficiency, transparency, security, and accountability. Data were analyzed using descriptive statistics and simple linear regression.

The results indicate that both community participation and the perceived implementation of electronic land certificate services were rated as high. Simple linear regression analysis showed a positive and statistically significant association between community participation and the perceived implementation of electronic land certificate services ($\beta = 0.585$; $p < 0.05$). The coefficient of determination (R^2) of 0.555 indicates that the model explains 55.5% of the variation in the perceived implementation of electronic land certificate services, while the remaining 44.5% is explained by factors outside the research model. These findings suggest that higher community participation is associated with better perceived implementation of electronic land certificate services. However, the findings should be interpreted as a statistical association rather than evidence of a causal relationship because the study employed a cross-sectional survey design.

Keywords: Community Participation, User Perception, Electronic Land Certificate.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Batasan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Landasan Teori.....	8
B. Kajian Literatur	34
C. Kerangka Berpikir	44
D. Hipotesis.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Format Penelitian	48
B. Alur Penelitian.....	48
C. Lokasi Penelitian	52
D. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	53
E. Pengertian Operasional atau Variabel	55
F. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	58
G. Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	65

B. Hasil Pengujian Instrumen	66
C. Pembahasan.....	83
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Rekomendasi dan Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, termasuk di bidang pertanahan yang rentan terhadap sengketa serta membutuhkan kepastian dan akurasi data. Sebagai bagian dari transformasi digital layanan pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menerapkan sertifikat tanah elektronik, yaitu dokumen kepemilikan hak atas tanah yang diterbitkan dan dikelola secara digital melalui sistem elektronik sebagai pengganti sertifikat fisik konvensional guna meningkatkan keamanan data, efisiensi pelayanan, dan kepastian hukum. Program ini bertujuan menggantikan sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik yang lebih aman dan mudah diakses, dengan keberhasilan implementasi yang diukur melalui peningkatan efisiensi pelayanan, transparansi proses administrasi, serta keamanan dan keandalan data pertanahan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), penerapan sertifikat tanah elektronik diharapkan dapat mengurangi risiko pemalsuan sertifikat, mempercepat proses administrasi pertanahan, serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik). Namun, adopsi kebijakan digital di bidang pertanahan tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem dan regulasi, tetapi juga sangat membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan agar implementasi sertipikat tanah elektronik dapat berjalan secara optimal.

Transformasi digital di bidang pertanahan sejalan dengan kebijakan nasional yang memberikan legitimasi hukum terhadap dokumen elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menjadi dasar umum pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

Pengaturan khusus mengenai sertifikat tanah elektronik kemudian diperkuat melalui regulasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yaitu Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 sebagai fase awal penerapan sertifikat elektronik, yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 sebagai dasar utama implementasi sertifikat tanah elektronik dalam pelayanan pertanahan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan sistem dan sumber daya, pemahaman masyarakat terhadap prosedur digital, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan elektronik. Dari berbagai tantangan tersebut, partisipasi masyarakat dipandang sebagai faktor kunci keberhasilan implementasi, sejalan dengan teori partisipasi masyarakat yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam kebijakan publik (Arnstein, 1969). Menurut Avivah (2025) dalam Jurnal Repository STPN, Keberhasilan implementasi sertifikat tanah elektronik sangat bergantung pada penerimaan dan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengguna layanan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program digitalisasi pertanahan umumnya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, minimnya pemahaman terhadap prosedur layanan elektronik, serta keraguan masyarakat terhadap manfaat dan keamanan data digital dalam pengelolaan pertanahan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Kennedy dkk. (2024) dalam Jurnal Transformasi Digital Publik yang menyatakan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat utama keberhasilan implementasi kebijakan berbasis elektronik di sektor pelayanan publik, termasuk layanan administrasi pertanahan. Selain itu, penelitian Isma, dkk. (2025) menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam layanan publik digital dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap sistem, kemudahan penggunaan, serta persepsi manfaat layanan, yang relevan dalam konteks penerapan sertifikat tanah elektronik sebagai layanan pertanahan berbasis digital.

Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat dalam mengikuti sosialisasi, menggunakan layanan sertifikat tanah elektronik, mematuhi prosedur layanan digital, serta memberikan respons atau umpan balik terhadap pelaksanaan layanan pertanahan elektronik. Partisipasi

tersebut berhubungan dengan efektivitas implementasi kebijakan karena penerimaan, pemahaman, dan penggunaan layanan oleh masyarakat turut menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan (Sulila, 2023). Dengan demikian, tingkat partisipasi masyarakat dipandang berkorelasi dengan keberhasilan implementasi sertipikat tanah elektronik yang diukur melalui efisiensi pelayanan, transparansi proses administrasi, dan keamanan data pertanahan. Namun, dalam praktiknya, tingkat partisipasi masyarakat masih menghadapi sejumlah tantangan yang secara langsung memengaruhi implementasi layanan sertipikat tanah elektronik, khususnya keterbatasan pemahaman terhadap prosedur layanan elektronik dan rendahnya literasi digital masyarakat (Adinegoro, 2023). Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menggunakan layanan sertipikat tanah elektronik sebagai pengguna layanan digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian Al Araby, (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi layanan elektronik tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan dan literasi digital masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci yang diduga memengaruhi keberhasilan implementasi sertipikat tanah elektronik.

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi sertipikat tanah elektronik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal masyarakat, tetapi juga oleh kondisi struktural yang melingkupi proses digitalisasi layanan. Kompleksitas tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program digitalisasi pertanahan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional. Namun, penelitian ini membatasi analisis pada partisipasi masyarakat sebagai variabel utama yang diuji pengaruhnya terhadap implementasi sertipikat tanah elektronik. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi sertipikat tanah elektronik merupakan bagian dari dinamika global dalam transisi menuju layanan pertanahan berbasis elektronik. Secara internasional, digitalisasi dokumen pertanahan telah diterapkan di berbagai negara untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan transparansi pengelolaan data pertanahan. Dengan demikian,

penerapan program ini di Indonesia memiliki relevansi strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola pertanahan yang modern, transparan, dan terpercaya.

Dalam konteks lokal, Kantor Pertanahan Jakarta Utara, khususnya di Kecamatan Tanjung Priok, menghadapi dinamika sosial yang cukup kompleks. Masyarakat di wilayah Jakarta Utara memiliki komposisi demografis dan sosial yang beragam, dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,8 juta jiwa pada tahun 2024 yang mencakup berbagai kelompok usia dan latar belakang (BPS, 2025). Kecamatan Tanjung Priok memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dari sisi pendidikan, pekerjaan, dan kemampuan memanfaatkan teknologi digital sehingga menarik dijadikan lokasi penelitian. Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan penelitian dan interaksi dengan pengguna layanan, masih ditemukan masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memahami prosedur layanan sertipikat tanah elektronik, khususnya pada tahapan persyaratan administrasi, penggunaan layanan digital, serta proses unggah dokumen. Selain itu, masyarakat masih cukup sering meminta penjelasan secara langsung kepada petugas loket meskipun informasi layanan telah tersedia melalui media digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi sertipikat tanah elektronik masih memerlukan dukungan partisipasi masyarakat agar tujuan digitalisasi pelayanan pertanahan dapat tercapai secara optimal. Penelitian oleh Yudistiara dan Santoso, (2024) dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap keamanan data dan legitimasi hukum dokumen elektronik berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi mereka dalam program pemerintah berbasis digital.

Melihat berbagai dinamika tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi sertipikat tanah elektronik tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan global maupun kesiapan kelembagaan, tetapi juga oleh karakteristik sosial masyarakat di tingkat lokal. Variasi tingkat literasi digital, persepsi terhadap keamanan data, serta akses terhadap teknologi membentuk tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan pertanahan berbasis digital, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, analisis pada level lokal menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang lebih

komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan digital di sektor pertanahan. Namun demikian, berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, kajian implementasi sertipikat tanah elektronik masih menitikberatkan pada aspek regulasi, kesiapan kelembagaan, atau persepsi masyarakat secara umum, dan belum secara spesifik menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan implementasi sertipikat tanah elektronik dalam konteks lokal perkotaan. Kekosongan kajian empiris tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk meneliti secara kuantitatif hubungan antara partisipasi masyarakat dan implementasi sertipikat tanah elektronik, khususnya pada wilayah dengan karakteristik sosial yang heterogen. Kondisi tersebut menjadikan Kecamatan Tanjung Priok sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji hubungan antara partisipasi masyarakat dan keberhasilan implementasi sertipikat tanah elektronik. Berdasarkan fenomena yang ada, isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejauh mana partisipasi masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan implementasi program sertipikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Oleh karena itu, peneliti menetapkan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Kantor Pertanahan Jakarta Utara (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Priok).”

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis, khususnya dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi sertipikat tanah elektronik. Rekomendasi tersebut dapat berupa penguatan strategi sosialisasi, penyempurnaan mekanisme layanan, serta pola komunikasi publik yang disesuaikan dengan indikator partisipasi masyarakat, seperti keterlibatan dalam sosialisasi, penggunaan layanan digital, kepatuhan terhadap prosedur, dan pemberian umpan balik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara partisipasi masyarakat dan efektivitas implementasi kebijakan digital di bidang pelayanan publik, khususnya sektor pertanahan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat pengguna layanan sertipikat tanah elektronik di Kecamatan Tanjung Priok dalam implementasi program sertipikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan Jakarta Utara?
2. Sejauh mana partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat dalam implementasi layanan sertipikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan sertipikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- b. Mengidentifikasi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap tingkat keberhasilan implementasi program sertipikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan Jakarta Utara.

2. Kegunaan Penelitian:

Bagi Penulis:

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk memperluas wawasan serta pemahaman mengenai digitalisasi pertanahan, khususnya terkait implementasi sertipikat tanah elektronik dan faktor partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilannya. Selain itu, penelitian ini meningkatkan kemampuan peneliti dalam melakukan analisis data, pengembangan kerangka teori, serta penerapan metodologi penelitian ilmiah di bidang administrasi publik dan pertanahan. Secara pribadi, penelitian ini juga menjadi pengalaman empiris yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan kompetensi profesional di bidang pertanahan dan pelayanan publik berbasis digital.

Bagi Masyarakat:

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, prosedur, serta keamanan penggunaan sertipikat tanah elektronik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses digitalisasi layanan pertanahan dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem sertifikasi tanah elektronik.

Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, diharapkan pemanfaatan layanan sertipikat tanah elektronik menjadi lebih optimal serta mendukung peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas pelayanan pertanahan.

Bagi Kantor Pertanahan:

Hasil penelitian ini memberikan masukan dan rekomendasi bagi Kantor Pertanahan Jakarta Utara dalam meningkatkan efektivitas implementasi program sertipikat tanah elektronik, terutama dari aspek sosialisasi, edukasi, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Penelitian ini juga dapat membantu instansi dalam mengidentifikasi hambatan yang terjadi di lapangan serta merumuskan strategi untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam program digitalisasi pertanahan. Dengan demikian, Kantor Pertanahan dapat mengoptimalkan pelayanan publik serta mendukung kebijakan nasional terkait transformasi digital di bidang pertanahan.

D. Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup kerja Kantor Pertanahan Jakarta Utara, dengan fokus wilayah studi pada Kecamatan Tanjung Priok. Pembahasan penelitian dibatasi pada analisis hubungan antara partisipasi masyarakat dan keberhasilan implementasi program sertipikat tanah elektronik. Ruang lingkup penelitian tidak mencakup seluruh aspek teknis pertanahan, melainkan dibatasi pada partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah elektronik, pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan, tingkat keterlibatan dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah elektronik, serta respons masyarakat terhadap proses alih media sertipikat fisik menjadi sertipikat elektronik.

Penelitian ini tidak membedakan responden berdasarkan jenis layanan sertipikat tanah elektronik yang digunakan, seperti pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data, maupun alih media sertipikat. Seluruh responden dianalisis sebagai satu kelompok pengguna layanan sertipikat tanah elektronik sehingga hasil penelitian menggambarkan persepsi masyarakat secara umum dan belum menjelaskan kemungkinan perbedaan persepsi berdasarkan karakteristik layanan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh partisipasi masyarakat terhadap implementasi sertipikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan fokus penelitian pada masyarakat pengguna layanan di Kecamatan Tanjung Priok, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi sertipikat tanah elektronik berada pada kategori baik dan terbukti berpengaruh positif serta signifikan terhadap implementasi sertipikat tanah elektronik. Hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,585 dengan nilai signifikansi $<0,05$, sehingga hipotesis penelitian diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi, menggunakan layanan, mematuhi prosedur, serta memberikan umpan balik, maka semakin baik pula implementasi sertipikat tanah elektronik yang ditinjau dari aspek efektivitas, efisiensi, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas.
2. Partisipasi masyarakat memberikan kontribusi sebesar 55,5% terhadap implementasi sertipikat tanah elektronik, sedangkan 44,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, seperti literasi digital, kesiapan sistem teknologi informasi, kompetensi petugas, kualitas sosialisasi, dukungan organisasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sertipikat tanah elektronik tidak hanya bergantung pada partisipasi masyarakat, tetapi juga memerlukan dukungan kelembagaan, teknologi, dan sumber daya pelaksana.

B. Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara disarankan meningkatkan edukasi masyarakat melalui media sosial resmi seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan WhatsApp Channel yang berisi video singkat mengenai prosedur sertipikat tanah elektronik. Selain itu, sosialisasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah kelurahan, ketua RT/RW, serta penyelenggaraan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat Kecamatan Tanjung Priok sehingga informasi

mengenai layanan digital dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Serta untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat, Kantor Pertanahan perlu menyediakan mekanisme konsultasi daring, layanan pengaduan berbasis digital yang mudah diakses, serta pembaruan informasi status permohonan secara real time melalui aplikasi atau media resmi.

2. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi implementasi sertifikat tanah elektronik, seperti literasi digital, kepercayaan masyarakat, kualitas pelayanan, kesiapan teknologi, maupun faktor organisasi. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan jumlah responden yang lebih besar, mencakup wilayah penelitian yang lebih luas, menerapkan pendekatan *mixed methods* atau kualitatif, serta melakukan studi komparatif antar kantor pertanahan sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif, mendalam, dan memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, R. R. (2023). Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Kenotariatan Volume 4 Issue 2 (2023)*, pp 129-142, 129-142.
- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010*.
- Al Araby, M. A. (2024). Transforming Citizen Engagement In E-Governance Framework: A Conceptual Analysis. *JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik Volume 10 No. 2*, 213-236.
- Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *SASI Jurnal Terakreditasi Nasional Volume 27 Nomor 3, Juli - September 2021*, 335-345.
- Ama Duli, G., Toda, H., Seran, D. N., & Long, B. L. (2025). Efektivitas Penerapan E-Government dalam Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Website Resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata). *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi Volume 5. Nomor. 2 Juli 2025*, 601-617.
- Arastha, A., Almadinah, B., Ferrysca, N. A., & Nurdin. (2025). Mengatasi Kesenjangan Digital: Mewujudkan Inklusi dan Partisipasi Masyarakat Indonesia Melalui E-Government. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Juni 2025 (17)1:84-90*, 84-90.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969 pp. 216-224*, 216-224.
- Askolani, Sari, M., Gautama, B. P., Perdana, Y., & Maulid, D. L. (2024). Measuring Key Factors in E-Government Participation: A Rasch Modeling Approach with Human Resource Management Considerations. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol. 08 No. 02, June 2024*, 684-696.
- Asrofi, Rulinawaty, & Yumiati. (2025). Paradoks Digitalisasi Pelayanan Pertanahan: Analisis Kegagalan Implementasi Sistem Elektronik di Kota Bengkulu. *Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7, No. 6 (2025)*, 4772-4782.

- Auliyaa, P., Hidayat, R., & Nababan, R. (2021). Implementasi pelayanan publik berbasis e-government melalui ogan lopian. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol 18 No 4 2021*.
- Avivah, L. N. (2025). Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung. *Repository STPN*.
- Bachtiar, R., Dwi , D. L., Pratiwi, H. E., & Saniyyah, N. (2020). Birokrasi Digital: Studi Tentang Partisipasi dan Kesiapan Masyarakat. *Journal of Governance and Social Policy Volume 1, Issue 2, December 2020 (104-129)*, 104-129.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Utara. (2025, November 6). Diambil kembali dari BPS: Lebih dari Sekadar Angka, Memotret Kisah Jakarta Utara: <https://jakutkota.bps.go.id/id/news/2025/11/06/325/bps-lebih-dari-sekadar-angka-memotret-kisah-jakarta-utara.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021, February 12). Diambil kembali dari Statistik Indonesia 2021. Jakarta: BPS.: <https://www.bps.go.id/id>
- Bashi, M. ‘., Abd Majid, H. N., Alden, S. M., Hussin, S., & Mohd Zahari, M. (2018). The Role of Environmental Knowledge and Mediating Effect of Pro-Environmental Attitude towards Food Waste Reduction. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences Vol. 8 , No. 17, Special Issue on Revisiting Foodservice and Gastronomy Intersection: Business, People and Performance*, 60-72.
- Creswell, J. W. (2012). *Research design : pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012, Edisi Ketiga.
- Depriyani, M. (2025). Pengaruh Kualitas Layanan Elektronik Terhadap Kepuasan Dan Partisipasi Masyarakat: Studi Kuantitatif Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan (JTMIT) Vol 4, No 1, Maret 2025 pp 230 - 237 P-ISSN: 2829-0232 E-ISSN: 2829-0038*, 230-237.
- Dewi , S. R. (2025). Persepsi Masyarakat Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang terhadap Implementasi Sertipikat Elektronik dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Repository STPN*.
- Ditasman, & Amrullah. (2024). KAJIAN LITERATUR : REFORMASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITALISASI. *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA) Volume1,No3–Juni 2024*, 525-532.

- Djarmiko, G. H., Sinaga, O., & Pawirosumarto, S. (2025). Digital Transformation and Social Inclusion in Public Services: A Qualitative Analysis of E-Government Adoption for Marginalized Communities in Sustainable Governance. *Sustainability* 2025, 17, 2908.
- Ghasemi, A., & Zahediasl, S. (2012). Normality Tests for Statistical Analysis: A Guide for Non-Statisticians. *International Journal of Endocrinology & Metabolism*, 486-489.
- Haerana, & Riskasari. (2022). Literasi Digital dalam Pelayanan Publik. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 6 Nomor 2, November 2022: 131-137*, 131-137.
- Hamim, R. N., Meidiana, A., Helmi, C., & Nurdin. (2024). Dampak Implementasi E-Government Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik di Desa Sukajaya. *Publishing Indonesian Journal of Public Administration Review Volume: 1, Number 3, 2024, Page: 1-16*, 1-16.
- Hanifah. (2025, 8 19). 6 Perbedaan Sertifikat Tanah Elektronik & Konvensional. Benarkah Lebih Aman? Diambil kembali dari 99.co.: <https://www.99.co.id/panduan/6-perbedaan-sertifikat-tanah-elektronik-konvensional-benarkah-lebih-aman/>
- Imam, S., & Daaris, Y. Y. (2024). Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik: Pelajaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bima. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5, No. 2, Mei 2024*.
- Isabella, Iriyani, A., & Lestari, D. P. (2023). Literasi Digital sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital. *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK VOLUME 8 No. 3 AGUSTUS 2023*, 167-172.
- Isma, Y. S., Kardiati, D., Muslem, Fadhillah, S. K., Jamiati, Akmal, F., & Chairunnisak, S. (2025). Transformasi Digital Sebagai Instrumen untuk Memperluas Aksesibilitas Layanan Publik. *Journal of Administrative and Social Science Volume 6 Nomor 2, Juli 2025*.
- Jafar AW, M. (2024). Dampak E-Government dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Volume 1, Nomor 4, Tahun 2024*, 204-225.
- Jagadhita, M. A. (2025). Transformasi Digital Sertifikat Tanah dan Respons Masyarakat Terhadap Penerapannya. *Jurnal USM Law Review Vol 8 No 3 Tahun 2025*.
- Jane, K. (2024). Impact of Digital Literacy on E-Government Utilization. *Research Gate*.

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*. (2021, Februari 12). Diambil kembali dari Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Jakarta: ATR/BPN.: <https://www.atrbpn.go.id/>
- Kennedy, A., Surya, W. H., & Wartoyo, F. X. (2024). Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 2, Edisi Juli – Desember 2024, pp.134-147*, 134-147.
- Kogoya, Y., Arius, T., Tingginehe, R., Ruru, Y., Bouway, D., & Mediati, N. (2024). Evaluation of Policy Implementation (G. Edward III Theory) on the Stunting Prevention and Treatment Program at Waena Health Center, Jayapura City Papua Province. *Formosa Journal of Science and Technology (FJST) Vol.3, No.2, 2024: 233-246*, 233-246.
- Kurhayadi. (2023). Community Participation in the Implementation of Regional Government in Indonesia. *International Journal of Science and Society, Volume 5, Issue 4, 2023*, 47-59.
- Laksono, M. Y. (2024, 8 6). *Sederet Perbedaan Sertifikat Tanah Analog dengan Elektronik*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/properti/read/2024/08/06/190612221/sederet-perbedaan-sertifikat-tanah-analog-dengan-elektronik>
- Maharani, A. E., Husodo, J. A., Firdaus, S. U., Isharyanto, Riwanto, A., Firdausy, A. G., . . . Wahyuni, S. (2024). Sosialisasi Literasi Digital Masyarakat Guna Optimalisasi E-Government di Kelurahan Hargobinangun, Sleman. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 4, No. 4 Agustus 2024, Hal. 665-679*, 665-679.
- Marfu'ah, S., Kumalasari, A., & Swasanti, I. (2024). DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIKKETIDAKSIAPANMASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI BOJONEGORO. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Volume 15, Nomor 2, Juni 2024*, 271-281.
- Marpaung, N. T. (2024). *Analisis Kelebihan dan Kekurangan Penerbitan Sertipikat Elektronik Sebagai Implementasi Konsep Digital Melayani di Bidang Pertanahan*.
- Maryuni,, S., Pardi, Darmawan, D., Apriyani, E., Rudianto, Zesa, P., & Selpiani, W. (2024). Transformasi pelayanan digital terpadu dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Volume 5, Nomor 4,(2024) hlm. 1011-1028*, 1011-1028.

- Masri, E., & Hirwansyah. (2023). Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 17, No. 1 (2023), pp. 157-174, 157-174.*
- Nurhayati, Handayani, R., & Febriadi, H. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kelurahan Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Kebijakan Publik Vol. 2, No. 2, 2025, 748-761.*
- Panigoro, S. F., Hamim, U., & Tui, F. P. (2025). Efektivitas Implementasi E-Government di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Gorontalo. *SosiologiJurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada MasyarakatVol. 2, No. 3, Mei2025, 134-147, 134-147.*
- Paris, Y. (2020). Reviewing Community Land Ownership Certificate Services in Various Studies. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 481 3rd International Conference on Education, Science, and Technology (ICEST 2019), 284-286.*
- Prihartono, D. (2023). PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNANCE PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Kebijakan: Jurnal Ilmu AdministrasiVolume 14, Nomor 2, Juni 2023, 192-200.*
- Prihatin, P. S., & Wicaksono, A. (2021). GRINDLE POLICY IMPLEMENTATION THEORY IN ANALYSIS OF FORESTRY CONFLICT IN PELALAWAN DISTRICT, RIAU PROVINCE. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics Volume 7 Nomor 2 Oktober 2021.*
- Putra, R. A., & Winanti, A. (2024). Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. *Jurnal USM Law Review Vol 7No 2 Tahun 2024, 835-852.*
- Rachmah, A., Djaja, B., & Sudirman, M. (2024). Implementation of Electronic Land Certificates as Legal Land Ownership. *POLRI | POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES VOLUME 3 NO. 1 (2024).*
- Salampessy, M., Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., Wijoyo, H., Arifin, A. H., Rasyid, . . . Wulandari, A. S. (2024). CITIZEN PARTICIPATION IN PUBLIC ADMINISTRATION: A REVIEW LITERATURE. *Science Humanity Journal Research Gate.*

- Samudra, D., Tamamudin, & Ayatullah. (2025). NNOVATION DIGITAL LITERACY PUBLIC ADMINISTRATION IN INDONESIA: NATIONAL SURVEY DATA. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* Vol 5, No. 2, 2025, 560-563.
- Santoso, I. A. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *PUBLISHING Volume: 2, Number 3, 2025, Page: 1-10*, 1-10.
- Santoso, L. (2025). Evaluating Digital Readiness for Adopting Mobile-Based Public Service Information Systems in Rural Areas. *Jurnal Publikasi Ilmu Teknik dan Informatika Volume 5 Nomor 2 Oktober 2025*, 208-127.
- Setyawan, R., Raharjo, B., & Dewayani, J. (2024). Governance in the Digital Era: Analyzing the Adoption of EGovernment Services in Local Authorities Through Quantitative Methods. *Journal of Management and Informatics (JMI) Vol. 3 No. 3 December 2024*, 434-450.
- Sisilianingsih, S., Purwandari, B., Eitiveni, I., & Purwaningsih, M. (2023). ANALISIS FAKTOR TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DI ERA PANDEMI. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK) Vol. 10, No. 4 Agustus 2023, hlm. 883-892*, 883-892.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta Bandung.
- Sulila, I. (2023). The Effect of Community Participation and Supervision on the Effectiveness of Village Fund Policy Implementation in Indonesia. *The Effect of Community Participation and Supervision (Atlantis Press Journal)*.
- Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. *International Journal of Medical Education. 2011; 2:53-55*, 53-55.
- Van Meter, D., & Van Horn, C. (1975). THE POLICY IMPLEMENTATION PROCESS A Conceptual Framework. *ADMINISTRATION & SOCIETY Formerly entitled JOURNAL OF COMPARATIVE ADMIN/STRATION*.
- Vargas, P. S. (2025). PERCEPTION AND SOCIAL BEHAVIOR IN CITIZEN PARTICIPATION: ITS IMPACT ON PUBLIC MANAGEMENT IN PERU. *TPM Vol. 32, No. S4, 2025*, 1603-1615.
- Wahyudi, A. (2016). Prospek Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Tulungagung. *Publiciana Vol 9 No 1 2016*.

- Weigl, L., Roth, T., Amard, A., & Zavolokina, L. (2024). When public values and user-centricity in e-government collide – A systematic review. *Journal Elsevier Government Information Quarterly* 41 (2024) 101956.
- Widyastuti, E. F. (2021). Kedudukan Sertipikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Serta Kantor Pertanahan. *Officium Notarium NO. 3 VOL. 1 DESEMBER 2021*; 476-484.
- Wijaya, J. H., Yunanto, S. E., Setyowati, Y., & Supardal. (2022). E-partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan E-government di Indonesia Tahun 2003-2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa (Village) Publishing Vol 03 No 01 Maret 2022*, 37-53.
- Wirawan, R., Mardiyono, & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4, No. 2 (2015)*, 301-310.
- World Bank Group. (2025, Februari 12). Diambil kembali dari Digital Government Readiness Assessment. Washington, DC: World Bank.: <https://www.worldbank.org/ext/en/home>
- Yaya, R., & Sukardi. (2025). Pengaruh Implementasi E-Government dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa dengan Good Government Governance sebagai Variabel Pemoderasi. *BALANCE : JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS Vol 10, No 1*, Hal 69 - 81.
- Yudistiara, D., & Santoso, B. (2024). Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Sebagai Pembuktian di Pengadilan. *NOTARIUS, Volume 17 Nomor 3 (2024)*.
- Yulianto, T., Hakim, L., Noor, I., & Suryadi. (2023). Implementation of Electronic Government in Indonesia. *Recent Development and Challenges Journal*, 417–425.
- Yuniastoeti, V., & Rahmafitria, F. (2024). Analyzing local community participation and barriers in tourism village development: A case study of Mekarlaksana Village. *SPMS Spatial Planning & Management Science*, 61-70